



Cabut Pilihan Sekolah, Pendaftaran Gugur

■ Yulianingsih

Orang tua dan siswa diimbau cermat dalam memilih sekolah.

SLEMAN — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, mulai berjalan, Rabu (1/7). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Sleman mengimbau agar orang tua dan siswa lebih cermat dalam memilih sekolah.

Sekolah negeri dalam PPDB kali ini sudah menggunakan sistem *real time online* (RTO), sedangkan SMK masih manual. Kepala Disdikpora Sleman Arif Haryono mengatakan, pendaftar hanya boleh memilih dua sekolah negeri. Pendaftaran ini akan gugur apabila siswa atau orang tua mencabut pilihan sekolahnya. "Kalau pilihannya ditarik, ya tidak bisa daftar ke sekolah negeri lagi. Paling bisa ke sekolah swasta," kata Arif saat ditemui di kantor dinasnyanya, Selasa (30/6).

Arif menjelaskan, pengamuliran di salah satu sekolah yang sudah dipilih akan membatalkan seluruh proses pendaftaran. Menurut dia, sistem tersebut sudah terintegrasi di semua sekolah pelaksana RTO, sehingga akan berjalan secara otomatis mendeteksi pergerakan PPDB. "Maka dari itu, orang tua dan anak harus memilih sekolah dengan tepat. Diharapkan jangan ragu," ujar dia.

Jadwal PPDB SMA negeri ini dibuka hingga 3 Juli. Sedangkan SMA swasta 1-7 Juli, SMK negeri 1-4 Juli, dan SMK swasta 1-7 Juli. Arif mengatakan, calon siswa bisa segera mengambil dan mengisi formulir di salah satu sekolah yang dituju. Pengisian formulir PPDB ini gratis karena pembayarannya ditanggung oleh biaya operasional sekolah (BOS). Beban formulir untuk SMA Rp 35 ribu, SMK Rp 45 ribu, dan SMP senilai Rp 30 ribu. Ia menekankan, Disdikpora sudah melarang pungutan biaya formulir pada para pendaftar. Adapun daya tampung siswa SMA di Sleman sebanyak 4.544 orang, dan SMK 8.112 orang, dan SMP 12.992 orang.

Disdikpora Sleman sudah menyiapkan keperluan PPDB ini, terutama terkait RTO. Lantaran, menurut Arif, tahun lalu pelaksanaan sempat terhenti selama setengah jam karena terlalu banyak antrean pada jaringan internet. "Itu *blank* semua. Bukan hanya di Sleman, di Bantul juga sama. Ma-

kanya, kami mengajukan peningkatan kapasitas internet," kata dia.

Di Kota Yogyakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan setempat Budi Asrori mengatakan, semua sekolah negeri di wilayahnya sudah menggunakan sistem RTO, terdiri atas 11 SMA dan 7 SMK. Setiap calon siswa SMA bisa memilih tiga sekolah sebagai pilihannya dan SMK dua sekolah. Menurut dia, dasar penerimaan siswa baru dalam PPDB tahun ini tetap menggunakan nilai ujian nasional (NUN). "Parameter siapa yang diterima tergantung pendaftar. Jika NUN yang masuk tinggi-tinggi, maka nilai terendah juga sudah tinggi," kata dia.

Untuk melihat pergerakan nilai pendaftaran sendiri, menurut Budi, setiap sekolah di Yogyakarta menyediakan layar lebar dan beberapa komputer di sekolah. Adapun kuota PPDB untuk siswa SMA negeri dari dalam kota mencapai 1.747 kursi. Sedangkan untuk siswa dari luar kota hanya 806 kursi. Sebelumnya Pemkot Yogyakarta sudah membuka PPDB untuk jalur khusus siswa pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) atau siswa dari keluarga miskin. Dari kuota yang tersedia, ada dua kursi yang kosong untuk tingkat SMA dan 92 kursi di SMK.

Pantau SKHUN

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana mengatakan, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) menjadi syarat utama dalam PPDB siswa tahun ini. Menurut dia, tidak ada toleransi bagi siswa yang tidak bisa menyerahkan SKHUN ke sekolah tujuan pendaftaran. Meskipun begitu, bagi siswa di luar DIY dengan SKHUN belum terbit, masih diperbolehkan menggunakan surat keterangan pengganti yang dikeluarkan kepala sekolah dan ditandatangani kepala Dinas Pendidikan setempat. "Kalau di DIY sudah tidak ada masalah, semua SKHUN sudah terbit," ujar dia.

Namun, Edy mengatakan, panitia PPDB tetap melakukan pengawasan ketat bagi daerah yang sudah menerbitkan SKHUN untuk mencegah adanya manipulasi. Misalnya, ada calon yang berupaya mendaftar double, yaitu di daerah asal dan di Kota Yogyakarta. "Kalau ada yang seperti itu, berarti tidak bisa ditoleransi karena itu tindakan yang tidak terpuji. Kebijakan ini hanya bagi daerah yang benar-benar belum terbit SKHUN-nya," kata dia.

■ c97 ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005